

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH OLEH PEMERINTAH DESA PAWINDAN
KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS
(Studi Analisis di Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce Reuse
Recycle Magot* Desa Pawindan)**

Resyi Nurfalah

Universitas Galuh Ciamis
E-mail : resyinurfalah16@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah belum optimalnya Pemerintah Desa melakukan komunikasi dengan masyarakat, belum optimal dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sikap pelaksana dalam pengelolaan sampah dan belum optimalnya dukungan pemerintah desa untuk keberhasilan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum belum berjalan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya komitmen, belum memadainya kemampuan aparatur pemerintah, kurangnya kesungguhan dan belum memadainya anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi, memberikan pemahaman dan penjelasan pengelolaan sampah dan mencari sumber-sumber anggaran.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menjadi masalah yang seakan tidak akan terselesaikan di Desa Pawindan, bermacam-macam sampah telah diproduksi oleh rumah tangga setiap harinya mulai dari golongan sampah organik dan non-organik, dengan cara pengolahan sampah yang masih bersifat pasif yaitu sampah yang hanya

dibuang dan di bakar begitu saja tanpa melalui pengolahan lebih lanjut ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS).

Pertumbuhan penduduk di Desa Pawindan yang semakin banyak berbanding lurus dengan jumlah timbunan produksi sampah. Selain kondisi tersebut masih dijumpai timbulan sampah atau buangan sampah di sungai sehingga memberikan dampak negatif pada lingkungan yang

akhirnya mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Pemerintah Desa Pawindan dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa salah satu aspek pembangunan yang dilakukan oleh Tempat Pengelolaan Sampah *reduce reuse recycle magot* Desa Pawindan.

Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah. Tugas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan limbah sampah;
- d. Melaksanakan pemanfaatan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan sampah; dan
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pemanfaatan limbah sampah.

Sedangkan, menurut Peraturan Desa Pawindan Nomor: 2 Pasal 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggara Bank Sampah yaitu sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. Melaksanakan pengelolaan sampah;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Tempat Pengelolaan Sampah *reduce reuse recycle magot* Desa Pawindan merupakan sektor terkemuka yang berwenang dalam menangani salah satu permasalahan kebersihan sampah di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang mempunyai tugas untuk melaksanakan operasional kebersihan meliputi; pelayanan kebersihan, memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pemanfaatan sampah.

Sehubung dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah Pemerintah Desa

Pawindan adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Desa Pawindan maka pemerintah desa harus berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

Desa Pawindan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan jumlah penduduk 5.070 orang dari jumlah penduduk tersebut menghasilkan sampah yang banyak ditambah dengan adanya perdagangan dan industri rumahan yang menghasilkan sampah organik maupun non-organik menjadi faktor utama banyaknya di Desa Pawindan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Pawindan belum berjalan optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa belum optimal dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah.
2. Pemerintah Desa belum optimal dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah.
3. Kurangnya sikap pelaksana yaitu kesungguhan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan sampah.
4. Belum optimalnya dukungan pemerintah desa untuk keberhasilan pengelolaan sampah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Van Meter dan Horn sebagaimana dikutip oleh Wahab (Anggara, 2014: 232), menyatakan bahwa:

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dari kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang mengacu pada teori George Charles Edwards III (Anggara, 2018: 250) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yang terdiri dari:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi atau sikap pelaksana;
4. Struktur Birokrasi.

Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

Winarno, (2016:101-102) menjelaskan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sedangkan Hadiwiyoto (2003:12) memberikan batasan definisi sampah yaitu:

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah bahan buangan atau sisa-sisa baik berbentuk padat atau setengah padat dari zat organik dan anorganik yang diproduksi oleh manusia dalam aktivitasnya maupun proses alam dan belum mempunyai nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Menurut Kartikawan, (2007:18) secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengelolaan sampah akan berhasil dan menjadi suatu lingkungan yang bersih apabila adanya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, karena masyarakat memegang peranan yang besar dalam hal mewujudkan lingkungan yang bersih, dan pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kebersihan lingkungan. Dengan

demikian pengelolaan sampah akan berjalan dengan baik apabila dapat melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi menurut teori George Charles Edwards III (Anggara, 2018: 250) yaitu:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi atau sikap pelaksana;
4. Struktur Birokrasi.

Sumber data primer yaitu informan berjumlah 5 orang terdiri dari Kepala Desa Pawindan, Ketua Tempat Pengolahan Sampah, Anggota seksi-seksi persampahan dan Masyarakat Desa Pawindan.

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukanagara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik

analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Pawindan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatehui bahwa pelaksanaan dimensi komunikasi belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan kedua indikator komunikasi yang belum optimal dilaksanakan. Seperti belum optimal dalam melakukan komunikasi yang dengan masyarakat dalam menjalankan peraturan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Pawindan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah oleh pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal.

Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Winarno (2016:156) mengungkapkan bahwa:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan

peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator-indikator sebagai alat ukurnya seperti dukungan dana yang memadai untuk keperluan pengelolaan sampah masih belum memadai sehingga pengelolaan sampah ini belum berjalan secara optimal dan dukungan pegawai yang yang berkompeten dalam pengelolaan sampah masih belum memadai.

Hasil penelitian tersebut kurang sesuai dengan pendapat Edward III (Widodo 2010:98) yang mengemukakan bahwa “faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan”. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan peranan sumberdaya sangat penting dalam pengimplemetasian kebijakan. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dan “sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan”. Dari kutipan tersebut sumberdaya memiliki beberapa aspek yang saling berhubungan di dalamnya

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi disposisi telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan indikator-indikatornya seperti semangat kerja pegawai pengelola sampah telah dimiliki oleh pegawai dan pelaksana dilapangan dan disukung dengan disiplin dan tanggung jawab pegawai pengelola sampah.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan Edward III (Widodo 2010:104) merupakan “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi bahwa telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan indikator-indikator sebagai alat ukurnya yaitu telah ada penetapan standar *operasional prosedur* dalam pengelolaan sampah, pembagian tugas yang jelas dalam pengangkutan sampah, ke tempat pengelolaan sampah

telah dilaksanakan dengan optimal dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas bagi petugas pengelola sampah telah dilaksanakan dengan optimal.

Dengan demikian hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa:

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur

Selanjutnya Winarno (2016:176) menyatakan bahwa:

Birokrasi merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi, maka struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur

organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi dan wawancara dimana masih adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal seperti kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menjalankan peraturan pengelolaan sampah, sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah oleh pemerintah Desa, belum memadainya dukungan dana yang memadai untuk keperluan pengelolaan sampah dan belum memadainya dukungan pegawai yang berkompeten dalam pengelolaan sampah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Pawindan dari hasil observasi dan wawancara yaitu kurangnya komitmen pemerintah desa, belum memadainya kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah, kurangnya kesungguhan, belum memadainya sumber anggaran dan kurang tersedianya pegawai ataupun petugas untuk melaksanakan berbagai pekerjaan di setiap bidangnya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pawindan dari hasil observasi dan wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat

sehingga peraturan desa yang telah diberlakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan seperti dengan adanya pemberian arahan dan petunjuk pada seluruh aparatur pemerintah desa, memberikan pemahaman dan penjelasan pengelolaan sampah untuk disampaikan pada masyarakat. Berupaya untuk mencari sumber-sumber anggaran lain untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan sampah yaitu dengan cara melakukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah. Merekrut calon petugas yang telah memiliki pengalaman dan memiliki kemampuan dalam bidang manajemennya. Selain itu juga pemerintah desa memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan secara rutin pada pelaksana dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hadiwiyoto, Soewedo. 2003. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN: Surabaya
- Kartikawan, Yudhi. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Jurnal Lingkungan Hidup. Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (Teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service)
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah Peraturan Desa Pawindan Nomor: 2 Pasal 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pedoman Penyelenggara Bank Sampah.